

KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI BAWAH PEMERINTAHAN JOKOWI: PERKEMBANGAN, PRIORITAS, DAN TANTANGAN

Sunaryo Jona Mahadana

Paramadina Graduate School of Diplomacy, Universitas Paramadina, Jakarta

Email: Sunaryo.mahadana@students.paramadina.ac.id

Abstrak

Kebijakan luar negeri Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengalami perkembangan yang mencolok. Dalam menjalankan kebijakan luar negeri, Jokowi memiliki tiga prioritas utama: urusan maritim dan keamanan, diplomasi ekonomi, dan perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri. Dalam hal urusan maritim dan keamanan, Indonesia mengakui posisinya sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Pemerintahan Jokowi telah mengambil inisiatif "Maritime Axis" untuk memanfaatkan potensi ekonomi dari sumber daya maritim Indonesia. Hal ini mencakup pengembangan jalur laut, infrastruktur maritim, dan penggunaan sumber daya laut yang berkelanjutan. Dalam diplomasi ekonomi, Indonesia aktif berpartisipasi dalam inisiatif seperti Belt and Road Initiative. Tujuannya adalah untuk memanfaatkan pertumbuhan ekonomi dan memperkuat hubungan dengan negara-negara mitra. Pemerintahan Jokowi melihat pembangunan ekonomi sebagai kekuatan penggerak untuk keterlibatan diplomatik. Perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri juga menjadi prioritas utama. Pemerintahan Jokowi telah meningkatkan layanan konsuler, manajemen krisis, dan perlindungan hak-hak warga negara Indonesia di luar negeri. Selain itu, perlindungan pekerja migran Indonesia juga menjadi fokus utama, dengan upaya untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan dengan negara tuan rumah. Kebijakan luar negeri Indonesia di bawah pemerintahan Jokowi mencerminkan visi strategis yang mengatasi keadaan geopolitik dan ekonomi Indonesia yang unik. Dengan penekanan pada urusan maritim dan keamanan, diplomasi ekonomi, dan perlindungan warga negara di luar negeri, Indonesia berusaha memanfaatkan kekuatannya, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan melindungi kepentingan warganya di dunia yang semakin terhubung.

Kata Kunci: Kebijakan Luar Negeri Indonesia, Diplomasi Paska-Jokowi, Pertumbuhan Ekonomi, Maritime Axis, Diplomasi Indonesia Di Masa Depan

Abstract

Indonesia's foreign policy under the leadership of President Joko Widodo (Jokowi) has experienced striking developments. In carrying out foreign policy, Jokowi has three main priorities: maritime and security affairs, economic diplomacy, and the protection of Indonesian citizens abroad. In terms of maritime and security affairs, Indonesia recognizes its position as the largest archipelagic country in the world. The Jokowi government has taken the "Maritime Axis" initiative to exploit the economic potential of Indonesia's maritime resources. This includes the development of sea routes, maritime infrastructure, and sustainable use of marine resources. In economic diplomacy, Indonesia actively participates in initiatives such as the Belt and Road Initiative. The aim is to capitalize on economic growth and strengthen ties with partner countries. The Jokowi administration views economic development as a driving force for diplomatic engagement. Protection of Indonesian citizens abroad is also a top priority. Jokowi's government has improved consular services, crisis management and protection of the rights of Indonesian citizens abroad. In addition, the protection of Indonesian migrant workers is also a major focus, with efforts to reach

favorable agreements with host countries. Indonesia's foreign policy under the Jokowi administration reflects a strategic vision that addresses Indonesia's unique geopolitical and economic circumstances. With an emphasis on maritime and security affairs, economic diplomacy, and the protection of citizens abroad, Indonesia seeks to leverage its strengths, encourage economic growth, and protect the interests of its citizens in an increasingly connected world.

Key Words: *Indonesian Foreign Policy, Post-Jokowi Diplomacy, Economic Growth, Maritime Axis, Indonesian Diplomacy In The Future.*

Pendahuluan

Indonesia, sebuah negara kepulauan yang luas terdiri dari ribuan pulau, telah lama memiliki posisi penting dalam hubungan internasional. Sebagai kepulauan terbesar di dunia, pentingnya geopolitik negara ini sangat terkait dengan keberagaman budaya yang kaya, sumber daya alam yang melimpah, dan lokasi geografis yang strategis. Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, yang akrab disapa Jokowi, kebijakan luar negeri Indonesia telah mengalami perkembangan yang mencolok, menandakan perubahan dari norma-norma historis sambil menavigasi kompleksitas dinamika global kontemporer (Surwandono, Maulana, Retnoningsih, & Nugroho, 2021, p. 300).

Untuk memahami nuansa kebijakan luar negeri Indonesia saat ini, penting untuk mempelajari dasar-dasar sejarah yang telah membentuk pendekatan negara ini terhadap hubungan internasional. Perjalanan Indonesia dari masa kolonial hingga menjadi negara berdaulat ditandai oleh tonggak-tonggak penting, termasuk perjuangan keras untuk kemerdekaan (Rosa, 2023). Upaya diplomasi yang menyusul kemerdekaan membentuk dasar prinsip-prinsip yang mengarahkan kebijakan luar negeri Indonesia saat ini. Terutama, komitmen negara ini terhadap otonomi dan non-blokerutama selama era Perang Dingin, yang tercermin melalui partisipasinya aktif dalam Gerakan Non-Blok, mencerminkan komitmen sejarah terhadap penentuan nasib sendiri dan penempatan strategis di arena global (Rosa, 2023).

Dalam latar belakang sejarah ini, pemerintahan Jokowi telah mengungkapkan narasi kebijakan luar negeri yang khas. Pusat dari narasi ini adalah penekanan yang jelas pada pembangunan ekonomi sebagai kekuatan penggerak untuk keterlibatan diplomatik. Inisiatif "*Maritime Axis*", program unggulan di bawah Jokowi, melambangkan fokus ini dengan berusaha memanfaatkan potensi maritim Indonesia yang luas untuk pertumbuhan ekonomi (Kristiyanti & Fauziningrum, 2022). Saat pemerintahan menempatkan diplomasi ekonomi di garis depan, muncul prinsip panduan - "*Diplomacy down to earth*". Prinsip ini menekankan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia harus langsung bermanfaat bagi rakyatnya, memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan sosial-ekonomi negara (Andika, 2016).

Keterlibatan regional juga menjadi aspek penting dari strategi kebijakan luar negeri Indonesia di bawah Jokowi. Sebagai anggota kunci *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN), Indonesia secara aktif berkontribusi terhadap stabilitas dan kerjasama regional (Margiansyah, 2020). Komitmen pemerintahan ini untuk memperkuat persatuan di antara negara-negara tetangga sejalan dengan visi yang lebih luas tentang Asia Tenggara sebagai wilayah kemakmuran bersama dan keamanan kolektif. Namun, komitmen regional ini tidak tanpa tantangan, terutama dalam menghadapi sengketa seperti di Laut China Selatan, di mana kecerdikan diplomasi diperlukan untuk menjaga stabilitas sambil mempertahankan kepentingan nasional Indonesia (Margiansyah, 2020).

Secara bersamaan, keterlibatan diplomatik global Indonesia mengungkapkan upaya strategis untuk mendiversifikasi hubungan internasionalnya. Pemerintahan ini telah mencari

kolaborasi dengan kekuatan global utama, terutama Amerika Serikat dan China, mengakui manfaat ekonomi dari kemitraan semacam itu (Margiansyah, 2020). Namun, pendekatan yang berpusat pada ekonomi ini telah memicu perdebatan tentang risiko potensial yang terkait dengan ketergantungan berlebihan pada negara-negara tertentu. Saat persaingan antara AS dan China semakin intens, Indonesia menemukan dirinya berada dalam posisi yang sensitif di tengah ketegangan geopolitik, yang menyoroti tindakan seimbang yang rumit yang diperlukan dalam diplomasi global kontemporer (Astuti & Indramawan, 2019).

Diplomasi ekonomi muncul sebagai tema yang berulang, dengan inisiatif seperti "*Maritime Axis*" menjadi bukti dari upaya proaktif Indonesia dalam mencapai pertumbuhan ekonomi melalui kerjasama internasional (Kristiyanti & Fauziningrum, 2022). Namun, kritik telah muncul, terutama mengenai distribusi manfaat ekonomi yang adil. Beberapa berpendapat bahwa keuntungan dari keterlibatan ekonomi mungkin tidak seimbang dan lebih menguntungkan komunitas kelas menengah hingga atas, yang menimbulkan pertanyaan tentang inklusivitas diplomasi ekonomi Indonesia.

Meskipun adanya inisiatif strategis, kebijakan luar negeri Indonesia di bawah Jokowi menghadapi banyak tantangan. Risiko ketergantungan ekonomi pada negara-negara tertentu, terutama Amerika Serikat dan China, sangat besar, yang dapat menyebabkan kerentanan potensial terhadap pergeseran geopolitik. Prinsip "*Diplomacy down to earth*", sementara menekankan manfaat bagi rakyat, telah menghadapi pengawasan karena diduga memihak segmen ekonomi tertentu (Andika, 2016). Selain itu, ketegangan regional, seperti di Laut China Selatan, membutuhkan navigasi diplomatik yang cermat untuk memastikan stabilitas sambil menjaga kepentingan nasional Indonesia.

Saat Indonesia berada di ambang pemilihan presiden baru pada tahun 2024, arah kebijakan luar negerinya bergantung pada keseimbangan. Pemerintahan yang baru akan mewarisi lanskap yang dibentuk oleh pilihan dan tantangan masa jabatan Jokowi (Astuti & Indramawan, 2019). Keseimbangan yang rapuh antara kepentingan ekonomi dan otonomi diplomatik, penyelesaian sengketa regional, dan navigasi lanskap global yang berkembang akan menjadi pertimbangan penting. Kemampuan dan kecerdikan Indonesia dalam menyesuaikan kembali pendekatan kebijakan luar negerinya untuk memenuhi tren dan tantangan yang muncul akan menentukan posisinya dalam kain hubungan internasional yang rumit.

Eksplorasi kebijakan luar negeri Indonesia di bawah pemerintahan Jokowi mengungkapkan permainan multifaset dari warisan sejarah, keharusan ekonomi, dan realitas geopolitik. Komitmen negara terhadap pembangunan ekonomi, kerja sama regional, dan keterlibatan global mencerminkan visi strategis untuk kemajuan nasional. Namun, tantangan ketergantungan potensial, sengketa regional, dan kritik mengenai distribusi yang adil dari manfaat ekonomi menekankan perlunya pendekatan kebijakan luar negeri yang cermat dan adaptif. Saat Indonesia menentukan jalannya ke depan, kalibrasi hati-hati dari strategi diplomasi menjadi penting.

Sejarah Kebijakan Luar Negeri Indonesia

Untuk mengungkap kompleksitas kebijakan luar negeri Indonesia kontemporer di bawah pemerintahan Jokowi, eksplorasi akar sejarahnya adalah hal yang tidak dapat dihindari. Perjalanan dimulai pada tahun 1945 ketika Indonesia, setelah menderita berabad-abad di bawah kekuasaan kolonial Belanda, muncul sebagai negara berdaulat. Era pasca-kolonial menandai awal

kebijakan luar negeri otonom Indonesia, membentuk dasar pendekatan khas negara ini terhadap hubungan internasional (Azaria Putri Randi, 2022).

Kemerdekaan pada tahun 1945 membawa komitmen terhadap kebijakan luar negeri yang berprinsip, dengan Indonesia teguh memegang prinsip-prinsip utama seperti non-blok dan keterlibatan aktif dalam forum-forum multilateral (Azaria Putri Randi, 2022). Etos non-blok, sikap strategis untuk tidak bersekutu dengan blok kekuatan besar selama Perang Dingin, menjadi salah satu dasar kebijakan luar negeri Indonesia. Pendekatan ini bertujuan untuk menjaga otonomi negara, memastikan bahwa Indonesia tidak terjerat dalam perjuangan ideologis pada masa itu.

Salah satu momen penting dalam sejarah awal kebijakan luar negeri Indonesia adalah pendirian Gerakan Non-Blok (GNB). Didirikan pada tahun 1961, GNB menghimpun negara-negara yang ingin mempertahankan kemerdekaan dari pengaruh Amerika Serikat dan Uni Soviet (Barton, 2023, pp. 123-125). Indonesia memainkan peran penting dalam gerakan ini, mengokohkan komitmennya terhadap non-blok di panggung global. GNB memberikan platform bagi Indonesia untuk mengartikulasikan visinya tentang kebijakan luar negeri yang independen dan netral, berbeda dari dinamika kekuatan dalam Perang Dingin.

Konferensi Bandung pada tahun 1955 merupakan peristiwa bersejarah lain dalam evolusi kebijakan luar negeri Indonesia. Diadakan di Bandung, Indonesia, konferensi ini mengumpulkan pemimpin dari 29 negara Asia dan Afrika, membuka jalan bagi pendirian NAM di kemudian hari. Konferensi Bandung berperan penting dalam memperkuat solidaritas di antara negara-negara yang baru merdeka dan mengartikulasikan prinsip-prinsip saling menghormati, non-agresi, dan non-interferensi dalam urusan internal (Azaria Putri Randi, 2022). Sebagai tuan rumah, Indonesia menunjukkan komitmennya untuk membentuk aliansi di luar blok kekuatan tradisional, berkontribusi pada munculnya era baru dalam diplomasi global.

Selama periode pembentukan ini, para pemimpin Indonesia, termasuk presiden pertama negara ini, Sukarno, memainkan peran penting dalam membentuk narasi anti-kolonialisme dan kemerdekaan. Konferensi Bandung, dengan fokusnya pada solidaritas Afro-Asia, membentuk dasar bagi lintasan kebijakan luar negeri yang mencari aliansi berdasarkan prinsip bersama daripada kesesuaian ideologi (Haryanto, 2014, pp. 18-20).

Namun, tahun 1960-an membawa tantangan karena perbedaan ideologi di dalam kepemimpinan Indonesia mengarah pada pergeseran orientasi kebijakan luar negeri. Munculnya "Orde Baru" di bawah Presiden Suharto menandai perubahan dari kebijakan luar negeri yang lebih didorong oleh ideologi pada era Sukarno. Pemerintahan Suharto memprioritaskan pembangunan ekonomi dan stabilitas, mengarah pada penyesuaian keterlibatan internasional Indonesia. Meskipun komitmen terhadap non-blok tetap ada, terjadi pergeseran yang terlihat menuju pragmatisme dan diplomasi ekonomi (Rosa, 2023).

Akhir Perang Dingin pada akhir abad ke-20 membawa dinamika baru bagi lanskap kebijakan luar negeri Indonesia. Runtuhnya Uni Soviet dan perubahan tatanan geopolitik global membutuhkan penilaian ulang strategi Indonesia.

Era pasca Perang Dingin juga menyaksikan Indonesia aktif berpartisipasi dalam forum-forum regional, dengan fokus pada Asia Tenggara. Menjadi anggota Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) pada tahun 1967, Indonesia berkomitmen untuk stabilitas dan kerja sama regional. ASEAN menyediakan platform untuk dialog dan kolaborasi, sejalan dengan visi Indonesia tentang Asia Tenggara yang bersatu dan makmur (Barton, 2023).

Ketika memasuki abad ke-21, Indonesia terus berjuang dengan keseimbangan yang halus antara mempertahankan otonomi yang berprinsip sambil aktif berpartisipasi dalam urusan global. Prinsip non-aliemasi dan keterlibatan aktif dalam forum multilateral tetap ada, mempengaruhi respons negara terhadap tantangan-tantangan baru seperti perubahan iklim, globalisasi ekonomi, dan ancaman transnasional.

Secara ringkas, pendekatan sejarah Indonesia terhadap kebijakan luar negeri telah dibentuk oleh perjuangannya untuk kemerdekaan, pengartikulasian prinsip non-aliemasi, dan partisipasi aktif dalam forum-forum internasional penting. Peran pendiri dalam Gerakan Non-Blok dan penyelenggaraan Konferensi Bandung menegaskan komitmen Indonesia untuk menciptakan jalur independen dalam urusan global (Azaria Putri Randi, 2022). Perkembangan dari era Sukarno ke pendekatan pragmatis pemerintahan Suharto mencerminkan adaptabilitas negara terhadap dinamika global yang berubah. Saat Indonesia menavigasi kompleksitas abad ke-21, konteks sejarahnya menjadi latar belakang penting untuk memahami kelanjutan dan adaptasi dalam kebijakan luar negeri di bawah pemerintahan Jokowi.

Kepemimpinan Jokowi: Tujuan dan Prioritas

Presiden Joko Widodo, yang umumnya dikenal sebagai Jokowi, telah mengarahkan kebijakan luar negeri Indonesia dengan visi strategis yang terwakili dalam tiga prioritas dan tujuan utama: urusan maritim dan keamanan, diplomasi ekonomi, dan perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri. Titik-titik fokus ini mewakili pendekatan dinamis dan pragmatis terhadap hubungan internasional yang menekankan komitmen Indonesia untuk memanfaatkan kekuatannya, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan melindungi warganya di dunia yang semakin terhubung.

Kepentingan Maritim dan Keamanan Nasional

Di tengah-tengah agenda kebijakan luar negeri Jokowi adalah penekanan pada urusan maritim dan keamanan. Fokus strategis ini mengakui posisi unik Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, yang dilengkapi dengan sumber daya maritim yang luas di dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) nya. Komitmen pemerintahan terhadap urusan maritim bukan hanya sekadar simbolis; ini adalah respons pragmatis terhadap realitas geopolitik dan peluang ekonomi yang ditawarkan oleh wilayah maritim Indonesia yang luas.

Inisiatif "Maritime Axis" Jokowi mencerminkan komitmen ini, dengan tujuan untuk menggali potensi ekonomi penuh dari sifat kepulauan Indonesia. Program ini bertujuan untuk memperkuat peran Indonesia sebagai negara maritim dengan mengembangkan jalur laut, infrastruktur maritim, dan mempromosikan penggunaan sumber daya laut yang berkelanjutan (Rachman, 2022). Prioritas ini sejalan dengan visi yang lebih luas, yaitu tidak hanya memastikan keamanan nasional tetapi juga memanfaatkan manfaat ekonomi yang berasal dari kegiatan maritim.

Keamanan, terutama di wilayah maritim, telah menjadi aspek penting dari kebijakan luar negeri Indonesia di bawah Jokowi. Negara ini menghadapi tantangan mulai dari sengketa wilayah di Laut China Selatan hingga perompakan dan penangkapan ikan ilegal (Kusuma & Faisal, 2022). Pemerintahan Jokowi telah aktif mengejar solusi diplomatik untuk konflik maritim regional sambil secara bersamaan meningkatkan kapasitas kekuatan maritim Indonesia untuk menjaga

perairannya. Pendekatan ganda ini mencerminkan pemahaman yang nuansa tentang keterkaitan antara keamanan maritim dan kemakmuran ekonomi.

Diplomasi Ekonomi

Diplomasi ekonomi merupakan salah satu pilar utama dalam agenda kebijakan luar negeri Jokowi, yang menekankan komitmen pemerintahan untuk memanfaatkan kemitraan internasional dalam pertumbuhan ekonomi. Presiden mengakui peran penting investasi asing, kemitraan perdagangan, dan pembangunan infrastruktur dalam mendorong ekonomi Indonesia ke depan (Hutabarat & Damayanti, 2023). Pendekatan yang berpusat pada ekonomi ini sejalan dengan prinsip "Diplomasi down to earth", yang menekankan manfaat yang nyata bagi rakyat Indonesia.

Salah satu hal yang sentral dalam diplomasi ekonomi adalah pengejaran aktif terhadap investasi asing. Pemerintahan Jokowi telah berupaya menciptakan iklim investasi yang menarik, melalui reformasi ekonomi dan penyederhanaan proses birokrasi untuk memfasilitasi aliran modal asing (Hutabarat & Damayanti, 2023). Orientasi strategis ini terlihat jelas dalam keterlibatan pemerintahan dalam inisiatif seperti Belt and Road Initiative (BRI), proyek pembangunan infrastruktur global yang dipimpin oleh China (Damuri, Perkasa, Atje, & Hirawan, 2019). Partisipasi Indonesia dalam BRI menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan konektivitas, mendorong pembangunan ekonomi, dan memperluas jaringan perdagangan.

Mempromosikan kemitraan perdagangan adalah aspek lain dari diplomasi ekonomi Jokowi. Pemerintahan ini telah terlibat dalam upaya diplomasi untuk memperkuat hubungan dengan mitra perdagangan utama, mengeksplorasi peluang akses pasar dan manfaat ekonomi yang saling menguntungkan (Damuri, Perkasa, Atje, & Hirawan, 2019). Upaya ini melampaui aliansi tradisional, mencerminkan pendekatan pragmatis dalam mendiversifikasi hubungan perdagangan dan mengurangi risiko ekonomi yang terkait dengan ketergantungan pada pasar tertentu.

Pembangunan infrastruktur menjadi instrumen kunci dalam alat diplomasi ekonomi Jokowi. Selain BRI, pemerintahan ini telah mengejar proyek-proyek infrastruktur yang ambisius di dalam negeri, meningkatkan konektivitas dan menciptakan dasar pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Hutabarat & Damayanti, 2023). Proyek-proyek ini tidak hanya menarik investasi asing, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan industri lokal dan ketahanan ekonomi secara keseluruhan.

Perlindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri

Di tengah kekuatan globalisasi, pemerintahan Jokowi menempatkan kepentingan perlindungan kesejahteraan warga Indonesia yang tinggal di luar negeri sebagai prioritas. Tujuan ini berasal dari pengakuan bahwa ketika Indonesia semakin terlibat dengan komunitas global, kesejahteraan warganya di luar batas negara menjadi semakin penting.

Upaya untuk melindungi warga Indonesia di luar negeri meliputi berbagai inisiatif, termasuk layanan konsuler, manajemen krisis, dan memastikan hak-hak dan martabat mereka dijaga. Pemerintahan ini telah bekerja untuk memperkuat hubungan diplomatik dengan negara-negara yang menjadi tuan rumah komunitas diaspora Indonesia yang signifikan, dengan tujuan menciptakan lingkungan di mana warga dapat berkembang sambil berkontribusi baik bagi negara tuan rumah maupun Indonesia (Hutabarat, Sianipar, Maya, & Mukhtar, 2022).

Selain itu, perlindungan pekerja migran Indonesia telah menjadi fokus utama. Dengan adanya tenaga kerja Indonesia yang cukup besar yang bekerja di luar negeri, pemerintahan ini telah berusaha untuk bernegosiasi dengan negara tuan rumah untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan, memastikan perlakuan yang adil, kompensasi yang layak, dan kesejahteraan keseluruhan pekerja Indonesia (Hutabarat, Sianipar, Maya, & Mukhtar, 2022). Tujuan ini sejalan dengan pertimbangan kemanusiaan yang lebih luas dan mencerminkan komitmen terhadap praktik kebijakan luar negeri yang etis.

Sebagai kesimpulan, prioritas dan tujuan kebijakan luar negeri pemerintahan Jokowi mencerminkan visi strategis yang mengatasi keadaan geopolitik dan ekonomi Indonesia yang unik. Penekanan pada urusan maritim dan keamanan mengakui sifat kepulauan negara ini, menghubungkan keamanan nasional dengan kemakmuran ekonomi. Diplomasi ekonomi, yang diwujudkan melalui partisipasi dalam inisiatif seperti *Belt and Road Initiative*, menegaskan komitmen untuk memanfaatkan kemitraan internasional demi pertumbuhan ekonomi (Damuri, Perkasa, Atje, & Hirawan, 2019). Pada saat yang bersamaan, dedikasi pemerintahan ini dalam melindungi warga Indonesia di luar negeri mencerminkan pemahaman yang nuansa tentang tantangan dan peluang yang ditawarkan oleh dunia yang semakin terhubung. Paradigma kebijakan luar negeri Jokowi, yang didasarkan pada pragmatisme dan pengejaran manfaat yang nyata bagi rakyat Indonesia, menciptakan panggung bagi keterlibatan yang dinamis dan adaptif dengan lanskap yang kompleks dalam hubungan internasional.

Antisipasi Perubahan Dinamika Global Paska-Jokowi

Seiring berakhirnya masa jabatan Presiden Joko Widodo, Indonesia berada di ambang era baru dalam dinamika global, ditandai oleh potensi pergeseran hubungan kekuatan yang berpotensi memengaruhi diplomasi negara. Perubahan yang diantisipasi melibatkan spektrum dimensi geopolitik, ekonomi, dan teknologi, dengan kenaikan China sebagai kekuatan global dan evolusi pendekatan kebijakan luar negeri Amerika Serikat menjadi pusat perhatian (Astuti & Indramawan, 2019). Selain itu, tren-tren baru dalam kemajuan teknologi, konflik regional, dan ketergantungan ekonomi menuntut pemeriksaan yang cermat untuk menavigasi jalur diplomasi Indonesia secara efektif dalam lanskap pasca-Jokowi.

Kenaikan China: Meresapnya Dinamika Kekuatan Global

Kenaikan China sebagai kekuatan global telah menjadi ciri khas abad ke-21, dan era pasca-Jokowi kemungkinan akan menyaksikan dampak lebih lanjut dari pergeseran geopolitik ini. Kehebatan ekonomi China, kemajuan teknologinya, dan pengaruh strategisnya memberikan peluang dan tantangan bagi Indonesia. Pemerintahan Jokowi, menyadari signifikansinya, aktif terlibat dengan inisiatif seperti Belt and Road Initiative (BRI), memperkuat hubungan ekonomi dan pembangunan infrastruktur (Damuri, Perkasa, Atje, & Hirawan, 2019).

Pasca-Jokowi, arah hubungan Indonesia-China akan dipengaruhi oleh bagaimana kepemimpinan yang baru menavigasi keseimbangan halus antara kolaborasi ekonomi dan menjaga kepentingan nasional. Belt and Road Initiative, khususnya, memiliki potensi untuk membentuk lanskap infrastruktur Indonesia, tetapi kekhawatiran tentang ketahanan utang dan isu kedaulatan mungkin meredakan antusiasme terhadap kemitraan semacam itu (Yolandha, 2023). Tantangannya adalah memaksimalkan manfaat kerja sama sambil meredam risiko

potensial, memastikan bahwa keuntungan ekonomi sejalan dengan kepentingan strategis jangka panjang Indonesia.

Selain itu, seiring China mencari peran yang lebih menonjol dalam tata kelola global, Indonesia mungkin menemukan dirinya menyesuaikan strategi diplomatisnya. Menyeimbangkan hubungan dengan baik China maupun sekutu tradisional, terutama Amerika Serikat, akan menjadi imperatif bagi ketahanan kebijakan luar negeri Indonesia (Astuti & Indramawan, 2019). Tarian lembut antara kekuatan utama ini memerlukan manuver diplomatik yang terampil untuk menjaga kepentingan nasional sambil memanfaatkan peluang ekonomi.

Perubahan Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat: Implikasi bagi Indonesia

Pendekatan kebijakan luar negeri yang berkembang dari Amerika Serikat pasca-Jokowi akan secara signifikan membentuk lanskap diplomatik Indonesia. Di bawah Jokowi, Indonesia menjaga hubungan strategis dengan AS, terutama dalam masalah ekonomi, sambil sekaligus menavigasi kompleksitas persaingan AS-China (Wiratraman, 2015). Trajektori masa depan keterlibatan AS di wilayah Asia-Pasifik, komitmennya terhadap multilateralisme, dan sikapnya terhadap isu seperti perubahan iklim akan mempengaruhi perhitungan strategis Indonesia.

Pentingnya administrasi Biden dalam membangun kembali aliansi dan kerja sama multilateral memberikan peluang bagi Indonesia untuk memperkuat hubungannya dengan AS dalam menghadapi tantangan global bersama. Perubahan iklim, khususnya, adalah area di mana Indonesia dan AS dapat bekerja sama, mengingat keanekaragaman hayati Indonesia dan kerentanannya terhadap masalah yang terkait dengan iklim. Namun, pendekatan yang cermat terhadap hubungan AS-China dan pergeseran potensial dalam kebijakan perdagangan AS akan menuntut penilaian kembali hati-hati terhadap strategi diplomatik Indonesia.

Selain itu, fokus administrasi Biden pada hak asasi manusia dan nilai-nilai demokratis dapat mempengaruhi nada hubungan AS-Indonesia (Wirasenjaya, 2017). Menyeimbangkan kerja sama ekonomi dengan komitmen pada prinsip demokratis dapat menjadi tugas diplomatik yang rumit. Era pasca-Jokowi mungkin menyaksikan Indonesia menyesuaikan pendekatannya untuk sejalan dengan prioritas berubah Amerika Serikat, memastikan kemitraan yang saling menguntungkan sambil mempertahankan nilai dan kepentingan sendiri (Andika, 2016).

Kemajuan Teknologi: Membentuk Interaksi Diplomatik

Kecepatan kemajuan teknologi tanpa diragukan akan memengaruhi interaksi diplomatik dalam lanskap pasca-Jokowi. Saat dunia semakin terhubung melalui platform digital dan teknologi yang muncul, sifat diplomasi global akan mengalami perubahan transformasional. Revolusi Industri Keempat, yang ditandai dengan kemajuan dalam kecerdasan buatan, teknologi rantai blok, dan *Internet of Things*, memberikan peluang dan tantangan bagi Indonesia (Triwibowo, 2023).

Dalam ranah diplomasi, pemanfaatan teknologi digital dapat meningkatkan komunikasi, menyederhanakan proses, dan memfasilitasi kerja sama internasional. Keamanan Siber, bagaimanapun, muncul sebagai perhatian kritis, menuntut langkah-langkah yang kokoh untuk melindungi kepentingan nasional dan informasi yang sensitif (Triwibowo, 2023). Administrasi pasca-Jokowi harus menavigasi lanskap digital ini dengan cermat, memastikan bahwa Indonesia tetap berada di garis depan kemajuan teknologi sambil meredakan risiko potensial yang terkait dengan ancaman siber.

Selain itu, kemajuan teknologi juga memainkan peran penting dalam diplomasi ekonomi. Ekonomi digital, perdagangan elektronik, dan teknologi keuangan sedang membentuk pola perdagangan global (Madu, 2018). Era pasca-Jokowi menuntut pendekatan proaktif dalam memanfaatkan tren teknologi ini untuk meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di panggung global. Pengembangan kemitraan digital dan pengembangan infrastruktur digital yang kokoh akan menjadi komponen integral dari upaya diplomasi Indonesia dalam masa depan yang didorong oleh teknologi.

Konflik Regional dan Ketergantungan Ekonomi

Periode pasca-Jokowi akan terungkap di tengah konflik regional dan jaringan ketergantungan ekonomi yang rumit. Dalam Asia Tenggara, sengketa wilayah di Laut Cina Selatan terus menjadi tantangan bagi stabilitas regional (Andika, 2016). Indonesia, sebagai pemain kunci di ASEAN, harus menavigasi sengketa ini secara diplomatis, mempertahankan komitmennya terhadap kerja sama regional sambil melindungi kepentingan nasionalnya.

Ketergantungan ekonomi, yang tercermin dalam perjanjian dan kemitraan perdagangan regional, akan tetap menjadi ciri khas lanskap global. Administrasi pasca-Jokowi perlu aktif terlibat dengan kerangka ekonomi regional, seperti Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), untuk memastikan integrasi terus-menerus Indonesia ke dalam ekonomi global (Artner, 2017). Menavigasi keseimbangan halus antara kerja sama regional dan kedaulatan nasional akan menjadi krusial dalam konteks ini.

Selain itu, kepemimpinan Indonesia di ASEAN akan menjadi sorotan saat wilayah ini menghadapi tantangan-tantangan baru. Era pasca-Jokowi memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk menegaskan pengaruh diplomatiknya di ASEAN, berkontribusi pada penyelesaian masalah regional dan mempromosikan pendekatan kolaboratif terhadap tantangan bersama (Artner, 2017).

Sebagai kesimpulan, perubahan yang diantisipasi dalam dinamika global pasca-Jokowi melibatkan berbagai pergeseran geopolitik, ekonomi, dan teknologi yang pasti akan membentuk lanskap diplomasi Indonesia. Menavigasi kenaikan China, menyesuaikan kembali hubungan dengan Amerika Serikat, memanfaatkan kemajuan teknologi, dan mengatasi konflik regional akan menjadi penting bagi pemerintahan yang baru. Ketahanan diplomasi Indonesia dalam lanskap yang terus berubah ini akan bergantung pada kemampuannya untuk beradaptasi, menyeimbangkan kepentingan yang bersaing, dan memanfaatkan peluang kerja sama strategis di panggung global (Andika, 2016). Saat negara ini menetapkan jalannya ke era pasca-Jokowi, kalibrasi hati-hati terhadap strategi diplomatis akan menjadi kunci untuk memastikan terusnya keberlanjutan dan pengaruh Indonesia dalam dinamika hubungan internasional yang selalu berkembang.

Fokus Utama Diplomasi Indonesia di Masa Depan

Saat Indonesia beralih ke era pasca-Jokowi, diplomat negara dihadapkan pada lanskap internasional yang dinamis dan terus berkembang. Untuk menavigasi medan yang kompleks ini dan memajukan kepentingan Indonesia di panggung global, diplomat masa depan harus memusatkan upaya mereka pada beberapa area kunci. Analisis komprehensif ini menjelajahi titik-titik fokus kritis yang seharusnya membentuk agenda diplomasi Indonesia, mencakup hubungan bilateral dengan kekuatan besar, kemitraan regional dalam ASEAN, inisiatif seperti

integrasi ASEAN Economic Community (AEC), dan keterlibatan aktif dalam forum multilateral seperti G20 dan MIKTA.

Hubungan Bilateral dengan Kekuatan Besar: Menavigasi Dinamika China-AS

Diplomat Indonesia harus secara strategis menavigasi dinamika yang berkembang antara kekuatan global utama, terutama China dan Amerika Serikat. Kenaikan China sebagai kekuatan ekonomi dan geopolitik global telah menempatkannya sebagai pemain penting dalam lanskap kebijakan luar negeri Indonesia (Astuti & Indramawan, 2019). Sambil menjaga pendekatan pragmatis terhadap kolaborasi ekonomi dengan China, diplomat masa depan juga harus melindungi kepentingan nasional dan kedaulatan Indonesia.

Hubungan bilateral dengan China, yang berakar dalam kerja sama ekonomi melalui inisiatif seperti Belt and Road Initiative (BRI), menawarkan peluang dan tantangan (Kristiyanti & Fauziningrum, 2022). Diplomat masa depan harus memastikan bahwa kemitraan ekonomi berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan dan sejalan dengan tujuan strategis jangka panjang Indonesia. Negosiasi hati-hati terhadap proyek infrastruktur dan perjanjian ekonomi menjadi krusial untuk mencegah beban utang yang tidak wajar dan melindungi otonomi Indonesia.

Sementara itu, Amerika Serikat tetap menjadi mitra kunci bagi Indonesia, baik secara ekonomi maupun strategis. Diplomat masa depan harus terlibat aktif dengan AS dalam isu-isu kepentingan bersama, termasuk perubahan iklim, kerja sama ekonomi, dan keamanan regional (Artner, 2017). Mengingat penekanan administrasi Biden pada multilateralisme dan aliansi, Indonesia dapat menjelajahi peluang kolaborasi yang sejalan dengan prioritas diplomatiknya.

Menjaga keseimbangan yang halus antara kekuatan besar ini penting untuk ketahanan diplomasi Indonesia. Diplomat masa depan harus dengan cermat mengelola persaingan AS-China, memastikan bahwa Indonesia memaksimalkan peluang ekonomi sambil menghindari terlibat dalam ketegangan geopolitik (Azaria Putri Randi, 2022). Merawat sikap kebijakan luar negeri yang nuansa dan independen akan menjadi krusial dalam menavigasi hubungan yang rumit dengan pemain global utama ini.

Kemitraan Regional dalam ASEAN: Memperkuat Persatuan dan Kerja Sama

Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN) tetap menjadi landasan diplomasi regional Indonesia. Diplomat masa depan harus memberikan prioritas pada upaya memperkuat persatuan dalam ASEAN dan memajukan kerja sama lebih dalam terhadap tantangan regional (Andika, 2016). Membangun konsensus di antara negara-negara anggota dan mengatasi masalah bersama akan menjadi integral untuk menjaga ASEAN sebagai pusat dalam urusan Asia Tenggara.

Pemimpinan Indonesia dalam ASEAN memberikan peluang untuk membentuk agenda dan inisiatif regional. Diplomat masa depan harus aktif berkontribusi pada pencapaian ASEAN Economic Community (AEC), bekerja menuju integrasi ekonomi yang lebih dalam dan memfasilitasi aliran barang, jasa, dan tenaga kerja terampil yang lebih lancar dalam wilayah tersebut (Barton, 2023). Kerjasama ekonomi ini tidak hanya bermanfaat bagi negara-negara anggota individu, tetapi juga meningkatkan daya saing kolektif ASEAN di panggung global.

Selain itu, menangani kekhawatiran keamanan regional, termasuk sengketa wilayah di Laut Cina Selatan, harus tetap menjadi prioritas diplomasi. Diplomat masa depan harus terlibat dalam dialog konstruktif, mempromosikan resolusi damai, dan memperkuat prinsip hukum

internasional untuk menjamin stabilitas di wilayah tersebut (Haryanto, 2014). Menegakkan peran ASEAN sebagai pendorong perdamaian dan keamanan regional akan memerlukan keterlibatan strategis dan kehalusan diplomatis.

Integrasi ASEAN Economic Community (AEC): Memacu Pertumbuhan Ekonomi

ASEAN Economic Community (AEC) merupakan inisiatif penting bagi diplomat Indonesia masa depan untuk memacu pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut. AEC bertujuan untuk menciptakan pasar tunggal dan basis produksi, mendorong integrasi ekonomi di antara negara-negara anggota ASEAN (Artner, 2017). Diplomat Indonesia harus memainkan peran proaktif dalam memajukan tujuan AEC, memastikan bahwa manfaat ekonomi didistribusikan dengan adil dan berkontribusi pada kemakmuran keseluruhan wilayah.

Diplomat masa depan harus terlibat dalam upaya diplomasi ekonomi komprehensif, termasuk negosiasi perjanjian perdagangan, penghapusan hambatan non-tarif, dan promosi investasi lintas batas. (Kristiyanti & Fauziningrum, 2022) Dengan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi bisnis regional, diplomat dapat memfasilitasi peningkatan perdagangan dan investasi, sehingga meningkatkan ketahanan ekonomi baik Indonesia maupun ASEAN.

Selain itu, memajukan inovasi dan kolaborasi teknologi dalam wilayah harus menjadi fokus utama. Diplomat masa depan dapat mengeksplorasi inisiatif untuk menciptakan ASEAN digital, mendorong pengembangan infrastruktur digital, perdagangan elektronik, dan fintech. Memanfaatkan potensi ekonomi digital tidak hanya akan mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menempatkan ASEAN sebagai pemain global dalam lanskap teknologi yang cepat berubah.

Keterlibatan Multilateral: Menegakkan Pengaruh di Panggung Global

Keterlibatan aktif dalam forum multilateral sangat penting untuk strategi diplomasi Indonesia masa depan. G20 menjadi platform utama di mana Indonesia dapat menegakkan pengaruhnya dalam proses pengambilan keputusan ekonomi global. Diplomat masa depan harus berkontribusi aktif dalam membentuk diskusi tentang tata kelola ekonomi, pembangunan berkelanjutan, dan stabilitas keuangan global dalam kerangka G20 (Sinaga, 2023).

Kelompok MIKTA, yang terdiri dari Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia, memberikan saluran kolaborasi diplomatis lainnya. Diplomat masa depan dapat memanfaatkan MIKTA sebagai platform bagi negara-negara kekuatan menengah untuk berkolaborasi dalam isu-isu global seperti perubahan iklim, perdamaian, dan pembangunan ekonomi (Haryati, 2023). Memperkuat hubungan di dalam MIKTA memungkinkan Indonesia untuk memperbesar suara diplomatiknya dan berkontribusi dalam membentuk norma dan prinsip yang mengatur hubungan internasional.

Selain itu, partisipasi dalam organisasi seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan Indonesia platform untuk memperjuangkan isu-isu global, termasuk hak asasi manusia, keberlanjutan lingkungan, dan keadilan sosial. Diplomat masa depan harus aktif berkontribusi dalam diskusi PBB, memperkuat komitmen Indonesia terhadap perdamaian dan pembangunan global (Tanamal, 2023).

Sebagai kesimpulan, era pasca-Jokowi menawarkan sejumlah tantangan dan peluang diplomasi bagi Indonesia. Diplomat masa depan harus dengan cermat menavigasi kompleksitas lanskap global, menjaga keseimbangan hubungan dengan kekuatan besar, memajukan kerja

sama regional, memajukan integrasi ekonomi dalam ASEAN, dan terlibat aktif dalam forum multilatera (Hutabarat & Damayanti, 2023). Kalibrasi strategis dari upaya diplomatis dalam area-area kunci ini akan menjadi krusial untuk memastikan kelangsungan dan pengaruh Indonesia dalam dinamika hubungan internasional yang terus berubah (Andika, 2016). Saat negara ini menentukan arahnya ke masa depan, keahlian diplomatis diplomat Indonesia akan memainkan peran kunci dalam membentuk agenda kebijakan luar negeri yang tangguh dan adaptif.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan dari tulisan ini adalah bahwa kebijakan luar negeri Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Pemerintahan Jokowi telah menekankan tiga prioritas utama dalam kebijakan luar negeri, yaitu urusan maritim dan keamanan, diplomasi ekonomi, dan perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri. Penekanan pada urusan maritim dan keamanan mengakui posisi unik Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, sementara diplomasi ekonomi menunjukkan komitmen untuk memanfaatkan potensi ekonomi negara ini. Perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri juga menjadi fokus utama pemerintahan ini.

Saran yang dapat diberikan berdasarkan tulisan ini adalah bahwa Indonesia harus terus memperkuat posisinya sebagai negara maritim dengan mengembangkan infrastruktur maritim dan mempromosikan penggunaan sumber daya laut yang berkelanjutan. Selain itu, Indonesia juga perlu terus memperkuat hubungan diplomatik dengan negara-negara yang menjadi tuan rumah komunitas diaspora Indonesia yang signifikan, serta melindungi hak-hak dan martabat warga negara Indonesia di luar negeri. Pemerintah juga harus terus bekerja untuk melindungi pekerja migran Indonesia di luar negeri dengan bernegosiasi dengan negara tuan rumah untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan.

Dalam menghadapi dinamika global kontemporer, Indonesia perlu terus mengembangkan pendekatan dinamis dan pragmatis dalam hubungan internasional. Pemerintah harus terus memanfaatkan kekuatan negara ini, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan melindungi kepentingan warga negara Indonesia di dunia yang semakin terhubung. Dalam hal ini, partisipasi dalam inisiatif seperti Belt and Road Initiative dapat menjadi langkah yang strategis untuk memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia. Secara keseluruhan, kebijakan luar negeri Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi mencerminkan visi strategis yang mengatasi keadaan geopolitik dan ekonomi negara ini. Dengan penekanan pada urusan maritim dan keamanan, diplomasi ekonomi, dan perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri, Indonesia dapat terus memainkan peran penting dalam hubungan internasional dan memperkuat posisinya di panggung global.

REFERENSI

- Andika, M. T. (2016). The Role of Indonesia in ASEAN Under Jokowi's Pro-people Diplomacy. *Prosiding Seminar Nasional INDOCOMPAC*, 622-631.
- Artner, A. (2017). ROLE OF INDONESIA IN THE EVOLUTION OF ASEAN. *The Journal of East Asian Affairs*, Vol. 31, No.1, 1-38.
- Astuti, E. S., & Indramawan, d. D. (2019, Oktober 18). *Indonesia's opportunities amid US-China trade war*. Retrieved from thejakartapost.com:

<https://www.thejakartapost.com/academia/2019/10/18/indonesias-opportunities-amid-us-china-trade-war.html>

- Azaria Putri Randi, M. M. (2022). GERAKAN ANTI MODAL ASING PADA AWAL PEMERINTAHAN ORDE BARU (1967-1974). *Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah*, 1-20.
- Barton, G. (2023). The Historical Context and Regional Social Network Dynamics of Radicalisation and Recruitment of Islamic State Foreign Terrorist Fighters in Indonesia and its Southeast Asian Neighbours. *Journal of International Analytics*, 117-140.
- Damuri, Y. R., Perkasa, V., Atje, R., & Hirawan, d. F. (2019). *Perceptions and Readiness of Indonesia towards the Belt and Road Initiative*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies (CSIS).
- Haryanto, A. (2014). PRINSIP BEBAS AKTIF DALAM KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA: PERSPEKTIF TEORI PERAN. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, Vol. 4, No. 2, 17-27.
- Haryati, S. (2023, September 24). *Indonesia encourages MIKTA to become positive force in polarized world*. Retrieved from antaranews.com: <https://en.antaranews.com/news/294420/indonesia-encourages-mikta-to-become-positive-force-in-polarized-world>
- Hutabarat, L. F., & Damayanti, d. A. (2023). Diplomasi Ekonomi Indonesia Dalam Kerjasama Selatan-Selatan. *Intermestic: Journal of International Studies*, Vol. 7, No.2, 428-449.
- Hutabarat, L. F., Sianipar, I. M., Maya, A. J., & Mukhtar, d. S. (2022). Penerapan Portal PEDULI WNI dalam Upaya Perlindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri. *Jurnal Comunita Servizio*, Vol. 4, No. 2, 887-895.
- Kristiyanti, M., & Fauziningrum, E. (2022). MANAGING INDONESIA TO BECOME THE WORLD MARITIME AXIS. *Jurnal Sains dan Teknologi Maritim*, Vol. 22, No. 2, 111-116.
- Kusuma, A. W., & Faisal, d. M. (2022). STRATEGI PERTAHANAN LAUT INDONESIA DIHADAPKAN DENGAN PERKEMBANGAN LINGKUNGAN MARITIM GLOBAL DAN REGIONAL. *JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT*, vol. 10, no. 2, 332-338.
- Madu, L. (2018). Indonesia's Digital Diplomacy: Problems and Challenges. *Jurnal Hubungan Internasional*, Vol. 8, No. 1, 11-18.
- Margiansyah, D. (2020). REVISITING INDONESIA'S ECONOMIC DIPLOMACY IN THE AGE OF DISRUPTION: TOWARDS DIGITAL ECONOMY AND INNOVATION DIPLOMACY. *Journal of ASEAN Studies*, Vol. 8, No. 1, 15-39.
- Rachman, V. H. (2022). GEOPOLITICS: DYNAMICS AND DEVELOPMENT OF INDONESIA'S MARITIME AXIS. *Jurnal Ekonomi*, Vol. 11, No. 3, 1102-1108.
- Rosa, N. (2023, Maret 13). *Gerakan Non-Blok: Latar Belakang, Tujuan, Anggota & Peran Indonesia*. Retrieved from detik.com: <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6615990/gerakan-non-blok-latar-belakang-tujuan-anggota-peran-indonesia>
- Sinaga, Y. A. (2023, September 13). *Indonesia ensures G20 Bali's commitment continued in G20 New Delhi*. Retrieved from antaranews.com: <https://en.antaranews.com/news/293526/indonesia-ensures-g20-balis-commitment-continued-in-g20-new-delhi>
- Surwandono, S., Maulana, Z., Retnoningsih, T. A., & Nugroho, d. A. (2021). Evaluating Indonesia's Disaster Diplomacy Practices under the Jokowi Administration in 2018. *Intermestic: Journal of International Studies*, Vol. 5, No. 5, 297-311.

- Tanamal, Y. (2023, Oktober 12). *Indonesia wins sixth term on UN human rights body*. Retrieved from [thejakartapost.com: https://www.thejakartapost.com/indonesia/2023/10/12/indonesia-wins-sixth-term-on-un-human-rights-body.html](https://www.thejakartapost.com/indonesia/2023/10/12/indonesia-wins-sixth-term-on-un-human-rights-body.html)
- Triwibowo, A. (2023). The Characteristics of Indonesian Digital Diplomacy. *Journal of ASEAN Studies, Vol. 11, No. 1*, 167-196.
- Wirasenjaya, A. M. (2017). Indonesia's Foreign Policy and Multi-Track Regionalism. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research, Vol. 84*, 176-180.
- Wiratraman, H. P. (2015). Human Rights Constitutionalism in Indonesia's Foreign Policy. *Constitutional Review, Vo. 1, No. 1*, 130-158.
- Yolandha, F. (2023, Oktober 19). *Indonesia - China Perkuat Kerja Sama dalam Belt and Road Initiative*. Retrieved from [republika.co.id: https://ekonomi.republika.co.id/berita/s2r26k370/indonesia-china-perkuat-kerja-sama-dalam-belt-and-road-initiative](https://ekonomi.republika.co.id/berita/s2r26k370/indonesia-china-perkuat-kerja-sama-dalam-belt-and-road-initiative)

Copyright holder:

Sunaryo Jona Mahadana (2023)

First publication right:

[ADVANCES in Social Humanities Research](#)

This article is licensed under:

